

Women in the New Order Era (A Study of Family Planning and Population Control Policies from 1968 to 1983)

Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983)

Anifah^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

(*) Corresponding Author

anifahnew123@gmail.com

Abstract

Received: 11 Februari 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 17 Oktober 2025

Keywords:

Women's Identity, New Order Indonesia, State Policy, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Family Planning Program (KB)

This journal conducts research on how women's identity was structured during the New Order period from 1968 to 1983. Initially, the policies created by the PKK and KB aimed to control women's movements in the political sphere. Ultimately, these policies became very important because they were used as a means of controlling the state. As this study shows, state policies did not always focus on the welfare and interests of the people. The legitimacy of power was used as a tool for the interests of the people, but it was also used for personal interests or the interests of certain groups. In addition, the legitimacy of power is used to override the rights of the people by resorting to violence to implement established policies. At that time, Indonesian women were undergoing a period of transition.

PENDAHULUAN

Kajian Historiografi tentang penataan identitas perempuan Indonesia Masa Orde Baru dari ranah sosial ke politik, telah banyak tulisan yang membahas mengenai peranan perempuan tetapi tidak banyak yang menulis bagaimana transisi penyebab perubahan peranan itu terjadi dari kepemimpinan masa Orde Lama kepemimpinan masa Orde Baru. Perempuan memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan sebuah peradaban baru, karena dari perempuanlah awal generasi baru menerima didikan, tidak heran jika ketidak majuan perempuan mempengaruhi berkembang atau maju dan tidaknya suatu bangsa. Dalam sejarah Indonesia, perempuan memiliki dinamika tersendiri dalam sejarah peranannya, keikutsertaan perempuan dalam segala aspek pada kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diabaikan. Meskipun mayoritas perempuan di Indonesia berada di bawah dominasi patriarki, sejalan dengan tuntutan jaman dan kondisi real lingkungan sekitar, perempuan juga dituntut berperan aktif pada sektor publik.

Perjuangan perempuan pada awal abad ke-20 mulai mengarah pada kemajuan dalam mencapai kebebasan. yang sama dengan pria. Dimulai dengan merealisasikan gagasan yang ditulis oleh Kartini tentang kesadaran pendidikan bagi perempuan, yang didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kemajuan dan perubahan karena perempuan telah dididik dari generasi awal hingga generasi penerus bangsa (Majalah Wanita No.5, 1965: 1965). Oleh karena itu, tokoh-tokoh perempuan terdidik di Indonesia memulai perjuangannya di bidang pendidikan. Berkembangnya pendidikan perempuan berdampak pada peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berlanjut hingga masa revolusi fisik (1945-1950), di mana perempuan Indonesia melakukan upaya yang sangat progresif untuk mendirikan negara Indonesia. Di Indonesia, banyak organisasi perempuan dan peran.

Pada perkembangannya organisasi perempuan yang ada mulai terancam keberadaannya, rasa kerjasama dan kekompakan organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam badan koordinasi perempuan Indonesia yaitu Kongres Wanita Indonesia (KWI) tidak bertahan lama, dikarenakan dilatarbelakangi adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antar organisasi perempuan, mengakibatkan adanya pegeseran visi dan misi dari KWI, pada awal terbentuknya, serta adanya ketegangan situasi politik yang semakin memburuk di Indonesia, sebagai wadah untuk gerakan perempuan yang lahir bersamaan dengan gerakan nasionalis tidak sempat melanjutkan perbincangan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan di dalam tubuh KWI dan membangun kekuatan perempuan yang lebih kokoh, mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam tubuh organisasi tersebut. Ditengah ketegangan antar golongan politik di Indonesia yang sangat rawan, terjadi sebuah aksi politik,

yang merubah serta menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Peristiwa politik pada 1 Oktober 1965 (Gestapu/Gestok). Merubah tatanan kehidupan masyarakat, dikarenakan adanya politik adu domba, dengan melakukan penuduhan pembunuhan dan perbuatan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh kelompok politik dari golongan angkatan kepada golongan politik kiri, yang memiliki tujuan untuk menguasai kursi pemerintahan dengan melakukan propaganda dan kampanye fitnah kepada golongan PKI dan organisasi sosial dan organisasi perempuan yang memiliki paham sama, seperti organisasi perempuan Gerwani yang juga turut terkena dampaknya, seperti yang terlihat dalam pemberitaan surat kabar yang beredar antara bulan Oktober sampai Desember 1965. Hingga pada akhirnya terjadi pembersihan kelompok golongan politik kiri dan para organisasi-organisasi pendukungnya di Indonesia.

Golongan-golongan perempuan yang kontra terhadap Gerwani membentuk KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), mereka menuntut agar semua organisasi dibersihkan dari unsur-unsur PKI, dan agar semua organisasi kiri dinyatakan terlarang dan juga melakukan kampanye hitam untuk melengserkan presiden Sukarno sebagai Presiden dikarenakan isu yang berkembang bahwa Sukarno termasuk dalam pendukung PKI dan Gerwani. Berakhirnya masa kepemimpinan Sukarno (Orde Lama) pembersihan golongan politik dan organisasi kiri (PKI dan GERWANI). Berakhir juga masa kebebasan bagi kaum perempuan, dimana dimulainya masa penataan tubuh dan gerak perempuan di Indonesia, terlihat dari munculnya kebijakan-kebijakan baru yang diperuntukkan untuk perempuan. Perubahan pandangan tentang representasi dan peranan perempuan tidak hanya akibat dari perkembangan situasi politik maupun perjuangan perempuan. Melalui media pemerintah melancarkan propaganda untuk mengubah dan membentuk cara pandang masyarakat.

Selain arah pergerakan perempuan yang dengan sengaja dibentuk oleh Negara, untuk mengontrol pergerakan perempuan yang telah ada melalui sarana organisasi PKK, negara juga melakukan kontrol terhadap perempuan hingga ranah pribadi yakni menata tubuh perempuan adat pinggitan sebelum memiliki suami (Cora Vreede-DE Stuers, 2008). Di kehidupan para perempuan di Indonesia memiliki sedikit perbedaan, dimana kehidupan yang dijalani oleh para perempuan bangsawan berbeda sedikit dengan perempuan-perempuan dari golongan kelas sosial yang rendah. Dalam tiap kelas sosial kehidupan perempuan berbeda-beda, meskipun para perempuan dari golongan yang lebih rendah terlihat lebih bebas dan keras, tetapi pernikahan dini juga terjadi di kelas sosial ini sama seperti yang terjadi di kelas-kelas sosial lainnya. Selain adanya pernikahan dini, posisi perempuan pada masa itu berada dalam keadaan di bawah dominasi laki-laki dalam budaya patriarki, banyak ketidakadilan yang terjadi pada diri perempuan seperti adanya praktek poligami yang bebas, pergundikan dan adanya pandangan bahwa perempuan dengan mengeluarkan kebijakan KB konco wingking. Realita untuk menekan angka kelahiran yang pada masa sebelumnya kebijakan ini tidak pernah ada dan dibahas oleh pergerakan perempuan sebelumnya sehingga hal ini merupakan hal baru terhadap perkembangan kehidupan perempuan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis dampak kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Keluarga Berencana (KB) terhadap perempuan di Indonesia selama masa Orde Baru, khususnya antara tahun 1968 hingga 1983. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan analisis isi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan presiden, laporan tahunan BKKBN, dan arsip terkait kebijakan PKK dan KB. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk mantan anggota PKK, pejabat BKKBN, dan perempuan yang berpartisipasi dalam program KB. Analisis isi digunakan untuk memeriksa bagaimana kebijakan ini dipresentasikan dalam media massa pada masa itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi publik tentang peran perempuan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama terkait dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran kebijakan PKK dan KB dalam membentuk posisi perempuan dalam masyarakat Orde Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, merupakan periode yang penting bagi perempuan di Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diluncurkan pada tahun 1968. Kebijakan ini lahir sebagai respons

terhadap tantangan demografis dan sosial, dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui program KB, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil yang sejahtera, memberikan akses kepada kontrasepsi, dan meningkatkan kesehatan reproduksi. Meski demikian, implementasi program ini sering kali diwarnai dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kontrol terhadap perempuan, sehingga menciptakan dilema dalam pemberdayaan gender.

Program PKK, yang diluncurkan pada tahun 1972, juga berperan signifikan dalam kehidupan perempuan. Dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan kesejahteraan keluarga, PKK berusaha memberdayakan perempuan melalui berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Program ini mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produktif, seperti pertanian, kerajinan, dan usaha kecil. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik, PKK tetap mempertahankan norma-norma tradisional yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Hal ini menciptakan ketegangan antara upaya pemberdayaan dan penguatan stereotip gender yang ada.

Selama periode ini, kebijakan KB dan PKK berkontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat mengenai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi memberikan perempuan peluang untuk lebih mandiri. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat risiko bahwa kebijakan ini dapat memperkuat stigma dan tekanan sosial yang mengharuskan perempuan untuk memenuhi ekspektasi tertentu. Misalnya, keberhasilan program KB sering kali diukur dari seberapa banyak perempuan yang mematuhi penggunaan kontrasepsi, yang dapat memunculkan stigma bagi mereka yang memilih untuk memiliki lebih banyak anak.

Dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, kebijakan-kebijakan ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah Orde Baru berusaha membentuk identitas nasional yang sesuai dengan visi pembangunan mereka. Dengan menekankan peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik anak, rezim ini memperkuat narasi bahwa kesejahteraan keluarga adalah kunci bagi stabilitas sosial. Meskipun banyak perempuan yang mendapatkan manfaat dari program-program tersebut, penting untuk mengakui bahwa kebijakan ini juga membawa dampak ambivalen yang memengaruhi perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan kebebasan dalam menentukan nasib mereka sendiri.

KESIMPULAN

Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada masa Orde Baru membawa dampak yang kompleks bagi perempuan di Indonesia. Meskipun kebijakan ini menawarkan peluang untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga, sekaligus memberdayakan perempuan melalui keterampilan dan kegiatan ekonomi, tetap ada tantangan yang signifikan. Perempuan sering kali terjebak dalam norma-norma tradisional yang menempatkan mereka dalam peran domestik, sehingga proses pemberdayaan tidak sepenuhnya mengarah pada kesetaraan gender.

Disatu sisi, program-program ini berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dan pentingnya keluarga kecil yang sejahtera. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga menciptakan dinamika yang memperkuat stigma dan ekspektasi sosial yang membatasi pilihan perempuan. Dengan demikian, meskipun masa Orde Baru menciptakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, perjuangan mereka untuk memperoleh kesetaraan hak dan kebebasan masih menghadapi banyak rintangan yang harus diatasi dalam konteks sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianta, R. (1997). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Perempuan: Kasus PKK dan KB di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayati, N. (2015). Perempuan dan Kebijakan Keluarga Berencana di Era Orde Baru. *Jurnal Perempuan*, 20(2), 45-67.
- Kahn, S. (2001). *Women in Indonesia: Gender, Religion, and Social Change*. New York: Routledge.
- Nasution, R. (2013). *Peranan Program Keluarga Berencana (KB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Pujiyati, E. (2010). *PKK dan Perempuan: Kebijakan dan Implikasinya dalam Pembangunan*. Yogyakarta: LKiS.